

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pulau Kalimantan merupakan pulau terluas kedua di Indonesia yang luasnya hampir 2/3 dari wilayah Indonesia (dengan luas wilayah 743.330 km), dan terletak di sebelah utara Pulau Jawa dan di sebelah barat Pulau Sulawesi. Secara keseluruhan pulau yang di sebut Borneo ini terbagi atas 3 (tiga) wilayah, yaitu Brunei, Indonesia dan Malaysia. Wilayah di Pulau Kalimantan ini terbagi dalam 4 (empat) provinsi yaitu , Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Secara demografis, Pulau Kalimantan di huni berbagai suku bangsa yang tersebar di seluruh bagian Indonesia, baik penduduk pribumi (warga asli) maupun pendatang, seperti suku Dayak Tidung dan Bugis (Kaltim), suku Dayak Sampit dan Madura (Kalteng), suku Melayu, Sambas dan Jawa (Kalbar), serta suku Dayak Meratus dan Makassar (Kalsel).¹ Adanya kemajemukan dalam tatanan masyarakat di pulau Kalimantan menimbulkan dampak negatif, salah satunya terjadinya potensi konflik yang dilakukan antara penduduk asli dengan kelompok pendatang, sesama pihak pendatang, atau konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Permasalahan hubungan antara pendatang dengan masyarakat setempat pada umumnya berpusat pada permasalahan persaingan untuk memperebutkan sumber-sumber daya.

¹ Maria Lamria, *Analisa Penyebab Terjadinya Konflik Horizontal Di Kalimantan dalam jurnal Konflik Kelompok*, jakarta, 2008, hal 37

Oleh karena itulah masyarakat setempat (penduduk asli) melihat dirinya sebagai tuan rumah serta pemilik atas sumber-sumber daya yang ada di dalam wilayahnya. Sedangkan bagi masyarakat pendatang, keberadaannya hanya dilihat sebagai tamu. Hal ini lah yang sering memicu terjadinya konflik antara pendatang dan penduduk asli di Kalimantan. Penduduk asli melihat kedatangan masyarakat dari luar pulau Kalimantan hanya sebagai “perompak” yang akan menguras habis sumber-sumber daya yang ada di dalam wilayahnya.

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, dan politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial, dan kekuasaan (power) yang jumlah ketersediaannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Ketidakmerataan pembagian aset-aset sosial di dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau menambahinya bagi yang problem aset sosialnya relatif sedikit atau kecil. Sementara pihak tertentu berjuang untuk mendapatkan pembagian aset sosial tersebut berusaha untuk mempertahankan atau menambahinya disebut sebagai status quo dan pihak yang berusaha mendapatkannya disebut sebagai status need.

Pada dasarnya, secara sederhana penyebab konflik dibagi menjadi dua yaitu, *pertama*, kemajemukan horizontal, yang artinya adalah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras dan majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi, seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, militer, wartawan, alim ulama, sopir, dan

pendidikan. Kemajemukan horizontal-kultural menimbulkan konflik masing-masing unsur kultural tersebut mempunyai karakteristik sendiri dan masing-masing penghayat budaya tersebut ingin mempertahankan karakteristik budayanya tersebut.

Dalam masyarakat yang strukturnya seperti ini, jika belum ada konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik yang terjadi dapat menimbulkan perang saudara dan gerakan separatisme. Jika situasi ini terjadi, maka masyarakat tersebut akan mengalami disintegrasi. *Kedua*, kemajemukan vertikal, yang artinya struktur masyarakat yang terpolarisasi kekayaan dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sosial karena ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki kekayaan, pendidikan yang mapan kekuasaan dan kewenangan yang besar, sementara sebagian besar tidak atau kurang memiliki kekayaan, pendidikan rendah, dan tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan. Polarisasi seperti ini merupakan benih subur bagi timbulnya konflik sosial. Singkat kata, distribusi sumber-sumber nilai di dalam masyarakat yang pincang akan menjadi penyebab utama timbulnya konflik.²

Sebagaimana konflik etnis yang terjadi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah adalah salah satu contoh konflik komunal yang pernah terjadi di Indonesia. Konflik kekerasan yang terjadi di provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah ini bisa dikatakan sebagai kerusuhan antar etnis yang tergolong masif. Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan dirinya sebagai

² Krinus kum, "*Konflik Etnik: Telaah Kritis dan Konstruktif atas Konflik Etnis di Tanah Papua*", Litera Buku, Yogyakarta, Hal. 20-21

suku asli Kalimantan (etnik Dayak dan Melayu) berhadapan dengan kelompok masyarakat yang di anggap sebagai pendatang dari pulau Madura (etnik Madura).³ Saling bunuh tak terhindarkan tatkala antar etnik sudah tidak saling percaya dan menganggap eksistensi suku yang satu menjadi penghalang eksistensi suku yang lain.

Kerusuhan pecah pada akhir februari 2001 di wilayah Kalimantan Tengah. Ribuan orang Dayak bersenjata busur, panah, tombak memburu warga dari etnik Madura. Tindak pembunuhan dan perusakan nyaris terjadi di semua desa. Kerusakan semula terjadi sekitar sepekan di kota Sampit, namun merembet ke Kuala Kapuas, Pangkalan Bun, dan Palangkaraya. Dampak dari kerusuhan di Sampit ratusan orang terbunuh dan puluhan ribu pendatang (etnis Madura) dipaksa keluar dari bumi Kalimantan untuk kembali kedaerah asalnya di pulau Madura. Dua tahun sebelumnya kerusuhan serupa terjadi di Kalimantan Barat, yakni tepatnya pada februari 1999 yang terjadi di Kabupaten Sambas. Pada kejadian di Sambas, etnis Dayak membantu etnis Melayu dengan target yang sama, yakni suku Madura. Dari konflik ini pun ratusan warga meninggal. Konflik ini masih berlanjut, sebab setahun kemudian pada 25 oktober 2000, massa dalam jumlah besar kembali mengepung GOR Pontianak, tempat penampungan pengungsi dari kelompok etnis Madura.⁴

³ Heru Cahyono, "*konflik di kalbar dan kalteng: Sebuah Perbandingan*", Masyarakat Indonesia, Jilid XXX No.2, 2004, Hal.47-48

⁴ Heru Cahyono, *konflik Kalbar dan Kalteng, Jalan Panjang Meretas Perdamaian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, Hal. 2-4

Konflik etnis di Kalimantan Barat khususnya antara Dayak melawan Madura memiliki sejarah yang panjang dan telah berlangsung beberapa dekade. Semenjak 1950-an pertikaian antara etnis Madura berhadapan dengan Dayak nyaris tiada berkesudahan dan telah mengakibatkan ribuan orang terbunuh dari kedua pihak. Konflik antar etnis seolah tidak dapat di lepaskan dari realitas sosial sepanjang sejarah Kalimantan Barat. Konflik lebih mengemuka dibandingkan dengan kerja sama, serta integrasi gagal terwujud. Berkurangnya daya dukung lingkungan akibat pembangunan yang merusak lingkungan serta memarginalkan penduduk asli setempat telah mengakselerasi dan mengakumulasi prasangka antar etnik, sementara di lain pihak pola pemukiman khususnya warga Madura tersegregasi secara eksklusif. Pemukiman-pemukiman yang terpisah dari penduduk setempat ini telah mempersulit terjadinya kontak sosial dengan warga etnik lain.

Situasi berbeda akan terlihat di Kalimantan Tengah, dimana dalam sejarahnya hampir dapat dikatakan tidak pernah terjadi konflik yang menjurus pada kekerasan, kecuali menyangkut beberapa konflik kecil. Hubungan sosial antara warga pendatang dengan penduduk asli terjalin cukup baik, kendati mulai diperumit dengan masalah semakin terdesaknya suku asli Dayak dari kehidupan ekonomi. Itulah mengapa banyak pihak yang terkejut bagaimana mungkin kerusuhan yang terjadi di Sampit pada 2001 menjadi sangat masif dan mengakibatkan ratusan orang tewas. Ada beberapa faktor yang menyebabkan konflik etnis di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah bisa meluas.

Selain kebijakan komersialisasi hutan yang cenderung membuat rakyat setempat menjadi frustrasi (eksploitasi dan ketimpangan), tidak ditegakkannya hukum, situasi politik yang tidak menentu, resesi ekonomi, euforia otonomi daerah, kemajemukan etnisitas, tidak adanya budaya yang dominan, dan adanya perbedaan budaya antara kaum pendatang dengan penduduk setempat, serta yang tidak kurang ialah kemungkinan provokator.⁵

Begitu pula dengan apa yang terjadi pada kasus kerusuhan konflik etnis di kota Tarakan yang terletak di utara Kalimantan Timur pada September 2010. Perbedaan kepentingan serta buruknya interaksi sosial diantara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang telah menciptakan konflik sosial yang merugikan banyak pihak. Kota yang terkenal dengan nama “Bumi Paguntaka” ini memiliki karakteristik masyarakat yang majemuk, karena terdiri dari sejumlah suku bangsa dan etnis yang hidup saling berdampingan dalam suasana kebudayaan umum-lokal, namun tetap mempertahankan identitas sosial-budayanya.

Kemajemukan suku bangsa dan etnis yang berada di Kota Tarakan menimbulkan potensi konflik yang mudah terjadi. Hal ini terjadi adanya gesekan-gesekan sosial yang terjadi didalam masyarakatnya serta adanya kecemburuan sosial yang tinggi antara penduduk asli terhadap penduduk pendatang. Salah satunya konflik yang terjadi pada September 2010 yang bermula konflik individu yang mengakibatkan seorang warga berasal dari Dayak Tidung tewas terkena tusukan senjata tajam.

⁵ Ibid

Kebetulan etnis dari konflik individu itu antara etnis Dayak Tidung dengan Etnis Bugis-Letta. Kemarahan dan kegeraman etnis Dayak Tidung akibat mengetahui salah satu anggota keluarganya tewas serta Munculnya isu-isu yang berkaitan dengan kedua etnis tersebut konflik antar etnis pun tidak bisa dihindari.⁶

Seiring perkembangannya konflik di Kota Tarakan pun meluas hingga konflik terbuka antar komunitas atau etnis. Konflik yang terjadi di Kota Tarakan ini membuat roda perekonomian di kota Tarakan lumpuh total. Toko-toko, rumah, pusat perbelanjaan pun ditutup. Ribuan pengungsi di ungsikan menuju tempat pengungsian akibat dari konflik tersebut. Adapun titik pengungsian yang dilakukan pemerintah kota yaitu yonif 613 raja alam (markas TNI AD), Bandara Juwata dan Lanud, Kompi C Yonif 613 Raja Alam, serta Mapolres kota Tarakan yang menampung lebih dari 1.000 pengungsi korban konflik. Dari catatan Polda kaltim, jumlah pengungsi mencapai 40.170 jiwa. Bahkan ada ribuan warga kota Tarakan yang diungsikan keluar pulau Kalimantan seperti di pulau Nunukan.⁷

Konflik etnis/sosial yang terjadi pada kasus di Kota Tarakan Kalimantan Timur ini merupakan satu dari sekian banyak contoh kasus kerusuhan yang menimbulkan banyak korban jiwa. Sebagai sebuah bentuk gesekan sosial yang tidak mungkin di hindari, konflik hendaknya disikapi dengan positif, artinya berbagai perbedaan yang terjadi dan muncul dalam kehidupan bermasyarakat tidak perlu dijadikan ajang perpecahan namun justru sebaliknya mempererat dalam mempersatukan bangsa.

⁶ Lihat, Kompas-Kronologi Bentrok Di Tarakan.2010, Diakses pada 14 september 2012

⁷ Lihat, Samarinda Pos- Pengungsi Tarakan Mencapai 40.170 jiwa. 2010, Di akses 14 september 2012

Dalam hal ini, peran pemerintah kota Tarakan memang harus tegas dan cepat agar kekerasan antar kelompok atau etnis ini tidak meluas. Pendekatan keamanan saja tidak cukup untuk menjembatani jurang yang tercipta akibat kekerasan terbuka ini. Situasi tanpa kekerasan ini dapat dijadikan langkah awal untuk proses rekonstruksi komunikasi pasca konflik karena ada pekerjaan besar yang menunggu yaitu membangun kembali trust di antara kelompok yang bertikai. Dalam hal ini, semua pihak harus duduk bersama dan mendiskusikan masalah-masalah esensial yang menjadi akar permasalahan konflik. Harus diakui akar konflik komunal biasanya tidak kasat mata, dan lebih dari hanya sekadar konflik antar etnis. Ketidakpuasan warga asli yang telah berurat berakar akibat ketimpangan ekonomi, politik, dan keadilan yang mereka rasakan berujung pada meletusnya bentrokan hanya karena insiden kriminal kecil.

Kebijakan-kebijakan pembangunan pemerintah dianggap mendasari munculnya fenomena kekerasan komunal ini. Kebijakan tersebut cenderung meminggirkan masyarakat asli, dan akhirnya menjadi penonton atas "pembangunan" di daerah mereka. Hal ini diperparah dengan maraknya perusahaan-perusahaan besar yang berbondong-bondong datang mengeruk sumber daya alam, yang dengan susah payah dijaga oleh masyarakat asli sesuai nilai kultural mereka.

Saat para warga asli daerah secara sistematis dimarginalkan, pada saat bersamaan mereka mengalami represi saat berusaha menyuarakan keprihatinan mereka kepada pihak penguasa, baik nasional maupun lokal. Akibatnya, warga

pendatang yang dianggap turut serta menikmati hasil eksploitasi sumber daya itu akhirnya dianggap musuh yang jelas terlihat.

Dapat ditebak, akhirnya ketidakpuasan itu meledak menjadi sebuah kekerasan yang ditujukan kepada warga pendatang. Hal ini juga didorong faktor lain, yaitu adanya anggapan masyarakat pendatang sering tidak menghormati nilai-nilai budaya lokal, dan terlalu menjunjung eksklusivisme kesukuan yang sempit. Disamping perbaikan hak-hak ekonomi, politik, dan keadilan warga asli, rekonstruksi komunikasi pasca konflik juga harus dilakukan dengan memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk belajar menerima perbedaan.

Dalam hal ini peran pemerintah kota Tarakan yang meliputi Walikota dan Wakil Walikota beserta pihak terkait sebagai fasilitator menjadi sangat strategis dengan melakukan langkah-langkah preventif terhadap kemungkinan meledaknya konflik serupa di masa depan dan memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum kepada para warga dari kedua belah pihak. Tindakan tegas terhadap para pelanggar hukum mutlak dilakukan agar kondisi yang kondusif bisa terus dijaga. Dalam memfasilitasi upaya rekonstruksi komunikasi pasca konflik, pihak pemerintah sebaiknya melibatkan para pemimpin informal. Hal ini mutlak dilakukan karena para pemimpin informal dari masing-masing pihak biasanya lebih dipercaya karena dianggap memiliki legitimasi kultural untuk mewakili kepentingan dari masing-masing kelompok. Selain itu, kemampuan berbahasa daerah merupakan salah satu nilai tambah para pemimpin informal ini dalam berkomunikasi dengan para anggota kelompok mereka. Dengan cara ini

diharapkan pesan-pesan upaya persuasi perdamaian dapat secara efektif dikomunikasikan kepada para anggota masing-masing kelompok etnis.

Dari penjelasan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian konflik etnis ini. Disamping tertarik meneliti tentang konflik etnis, penulis juga ingin mengetahui peran pemerintah Kota Tarakan dalam Rekonsiliasi konflik etnis antara etnis Dayak tidung dan Bugis-Letta yang terjadi pada tahun 2010 ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah disebutkan maka penulis merumuskan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Peran Pemerintah Kota Tarakan Dalam Rekonsiliasi Konflik Etnis Antara Etnis Dayak Tidung dan Bugis-Letta Tahun 2010 ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pemerintah kota Tarakan dalam Rekonsiliasi konflik Etnis antara Etnis Dayak Tidung dan Bugis-Letta tahun 2010 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Gambaran permasalahan dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah kota Tarakan dalam Rekonsiliasi konflik etnis antara etnis Dayak Tidung dan Bugis-Letta di kota Tarakan tahun 2010.

- b. Ingin mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat peran pemerintahan kota Tarakan dalam Rekonsiliasi konflik etnis di kota Tarakan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan di capai penulis dari penelitian ini yaitu :

1. Dapat menjelaskan faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah kota Tarakan serta tahapan-tahapan yang dilakukan pemerintah kota Tarakan dalam Rekonsiliasi konflik etnis yang terjadi di kota Tarakan pada tahun 2010.

2. Sebagai sumbangsi referensi bagi masyarakat kota Tarakan bahwa konflik etnis yang terjadi di kota Tarakan adalah murni konflik individu yang kemudian meluas menjadi konflik komunal atau etnis yang disebabkan beberapa faktor

pemicu menjadi konflik komunal dan menimbulkan kerugian yang besar bagi kedua kelompok yang berkonflik dan masyarakat kota Tarakan sendiri.

D. Kerangka Dasar Teori

Untuk menjelaskan permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan beberapa teori untuk mendukung dasar pemikiran untuk mengupas permasalahan yang ada.

1. Konsep konflik

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau

dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.⁸

Penyebab terjadinya konflik dikelompokkan dalam dua kategori besar:

A. Karakteristik Individual

1. Nilai sikap dan Kepercayaan (*Values, Attitude, and Belief*) atau perasaan kita tentang apa yang benar dan apa yang salah, untuk bertindak positif maupun negatif terhadap suatu kejadian, dapat dengan mudah menjadi sumber terjadinya konflik.
2. Kebutuhan dan Kepribadian (*Needs and Personality*) Konflik muncul karena adanya perbedaan yang sangat besar antara kebutuhan dan kepribadian setiap orang, yang bahkan dapat berlanjut kepada perseteruan antar pribadi. Sering muncul kasus di mana orang-orang yang memiliki kebutuhan kekuasaan dan prestasi yang tinggi cenderung untuk tidak begitu suka bekerjasama dengan orang lain.

⁸ Lihat, <http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>, Di akses pada 11 desember 2012

3. Perbedaan Persepsi (*Perseptual Differences*) Persepsi dan penilaian dapat menjadi penyebab terjadinya konflik. Misalnya saja, jika kita menganggap seseorang sebagai ancaman, kita dapat berubah menjadi defensif terhadap orang tersebut.

B. Faktor Situasi

1. Kesempatan dan Kebutuhan Berinteraksi (*Opportunity and Need to Interact*)
Kemungkinan terjadinya konflik akan sangat kecil jika orang-orang terpisah secara fisik dan jarang berinteraksi. Sejalan dengan meningkatnya asosiasi di antara pihak-pihak yang terlibat, semakin mengikat pula terjadinya konflik. Dalam bentuk interaksi yang aktif dan kompleks seperti pengambilan keputusan bersama (*joint decision-making*), potensi terjadinya konflik bahkan semakin meningkat.
2. Ketergantungan satu pihak kepada Pihak lain (*Dependency of One Party to Another*)
Dalam kasus seperti ini, jika satu pihak gagal melaksanakan tugasnya, pihak yang lain juga terkena akibatnya, sehingga konflik lebih sering muncul.
3. Perbedaan Status (*Status Differences*) Apabila seseorang bertindak dalam cara-cara yang "arogan" dengan statusnya, konflik dapat muncul. Sebagai contoh, dalam pengambilan keputusan, pihak yang berada dalam level atas organisasi merasa tidak perlu meminta pendapat para anggota tim yang ada.⁹

⁹ Lihat, [http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/11/pengertian konflik dan definisinya serta faktor penyebabnya](http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/11/pengertian%20konflik%20dan%20definisinya%20serta%20faktor%20penyebabnya), Diakses pada 11 desember 2012

jenis-jenis konflik :

1) Konflik Intrapersonal

Konflik intrapersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. Sebagaimana diketahui bahwa dalam diri seseorang itu biasanya terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a). Sejumlah kebutuhan-kebutuhan dan peranan-peranan yang bersaing
- b). Beraneka macam cara yang berbeda yang mendorong peranan-peranan dan kebutuhan-kebutuhan itu terlahirkan.
- c). Banyaknya bentuk halangan-halangan yang bisa terjadi di antara dorongan dan tujuan.
- d). Terdapatnya baik aspek yang positif maupun negatif yang menghalangi tujuan-tujuan yang diinginkan.

Ada tiga macam bentuk konflik intrapersonal yaitu :

- a) Konflik pendekatan-pendekatan, contohnya orang yang dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama menarik.
- b) Konflik pendekatan – penghindaran, contohnya orang yang dihadapkan pada dua pilihan yang sama menyulitkan.
- c) Konflik penghindaran-penghindaran, contohnya orang yang dihadapkan pada satu hal yang mempunyai nilai positif dan negatif sekaligus.

2) Konflik Interpersonal

Konflik Interpersonal adalah pertentangan antar seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi antara dua orang yang berbeda status, jabatan, bidang kerja dan lain-lain. Konflik interpersonal ini merupakan suatu dinamika yang amat penting dalam perilaku organisasi. Karena konflik semacam ini akan melibatkan beberapa peranan dari beberapa anggota organisasi yang tidak bisa tidak akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi tersebut.

3) Konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok

Hal ini seringkali berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas, yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok kerja mereka. Sebagai contoh dapat dikatakan bahwa seseorang individu dapat dihukum oleh kelompok kerjanya karena ia tidak dapat mencapai norma-norma produktivitas kelompok dimana ia berada.

4) Konflik interorganisasi

Konflik intergrup merupakan hal yang tidak asing lagi bagi organisasi manapun, dan konflik ini menyebabkan sulitnya koordinasi dan integrasi dari kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas dan pekerjaan. Dalam setiap kasus, hubungan intergrup harus di manage sebaik mungkin untuk mempertahankan kolaborasi dan menghindari semua konsekuensi disfungsi dari setiap konflik yang mungkin timbul. Contoh seperti di bidang ekonomi dimana

Amerika Serikat dan negara-negara lain dianggap sebagai bentuk konflik, dan konflik ini biasanya disebut dengan persaingan. Konflik ini berdasarkan pengalaman ternyata telah menyebabkan timbulnya pengembangan produk-produk baru, teknologi baru dan servis baru, harga lebih rendah dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien.¹⁰

Macam-Macam Konflik :

1. Konflik antar Pribadi

Konflik antar individu, adalah konflik social yang melibatkan individu di dalam konflik tersebut. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan atau pertentangan atau juga ketidakcocokan antara individu satu dengan individu lain. Masing-masing individu bersikukuh mempertahankan tujuannya atau kepentingannya masing-masing. Misalnya dua remaja yang berpacaran. Si pria adalah perokok berat dan si wanita tidak senang pacarnya merokok. Kalau masing-masing mempertahankan pendapatnya dengan si wanita melarang pacarnya merokok dan pacarnya tadi tidak mau berhenti merokok atau tidak mau mendengarkan permintaan pacarnya, maka terjadilah konflik antar individu dan jika berlarut terus dapat terjadi mereka putus cinta dan tidak berpacaran lagi.

¹⁰ Lihat, <http://id.shvoong.com/business-management/management/2008566,jenis-jenis-konflik>, Di akses pada 11 desember 2012

2. Konflik antar Etnik

Etnik atau suku bangsa, biasanya memiliki berbagai kebudayaan yang berbeda satu dengan lainnya. Sesuatu yang dianggap baik atau sacral dari suku tertentu mungkin tidak demikian halnya bagi suku lain. Perbedaan etnis tersebut dapat menimbulkan terjadinya konflik antar etnis. Misalnya konflik etnis di Kalimantan antara suku Dayak dan suku Madura pendatang. Bagi suku Madura pendatang bekerja adalah suatu tuntutan bagi pemenuhan hidup di perantauan. Pekerjaan yang dilakukan menebang kayu di hutan dan tempat dimana mereka menebang kayu tersebut adalah tempat yang disakralkan oleh suku Dayak. Kesalah fahaman ini menyebabkan terjadinya konflik antar etnik Dayak dan Madura yang menelan korban banyak di antara kedua suku yang berkonflik tersebut.

3. Konflik antar Agama

Keyakinan dalam agama adalah keyakinan yang bersifat mutlak, artinya tanpa pembandingan. Beda dengan ilmu pengetahuan kebenarannya bersifat relative. Jika ditemukan teori baru dan menyangkal teori lama, maka teori lama akan diganti dengan teori baru. Agama tidak demikian kebenaran bersifat mutlak dengan menerima ajaran agama tersebut dengan keyakinan bahwa apa yang diajarkan dalam agama adalah benar. Sifat agama yang demikian sering menimbulkan berbagai konflik baik antar umat dalam satu agama, umat antar agama, maupun umat beragama dengan pemerintah. Potensi konflik yang berkaitan dengan agama tersebut pemerintah mencanangkan tiga kerukunan yaitu

kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar agama dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Berangkat dari anggapan dasar yang mutlak tersebut konflik agama dapat menyebabkan bencana yang besar karena mereka berkeyakinan pada jalan yang benar dan berani melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. konflik di irlandia utara antara kristen protestan dan katholik adalah contoh dari konflik antar agama. Penyerangan terhadap jemaah ahmadiyah di indonesia adalah contoh konflik antar agama.

4. Konflik antar Golongan atau kelas sosial

Konflik yang terjadi antar kelas social biasanya berupa konflik yang bersifat vertical yaitu konflik antara kelas atas dan kelas social bawah. Konflik ini terjadi karena kepentingan yang berbeda antara dua golongan atau kelas social yang ada. Golongan buruh yang menuntut perbaikan upah kepada pemerintah maupun perusahaan adalah wujud dari salah satu konflik antar golongan. Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah wujud dari konflik social antar kelas social yang ada. Pemerintah biasanya menjadi mediator agar kedua kepentingan kelas yang berkonflik dapat mencapai kesepakatan dan perusahaan tetap dapat menjalankan aktivitas produksinya.

Jika kesepakatan tidak tercapai maka perusahaan akan yerganggu proses produksinya dan buruh akan kehilangan pekerjaanya, jika terjadi demikian maka pemerintah akan terkena dampak dari konflik antar golongan yang ada.

5. Konflik antar Ras

Ras atau warna kulit merupakan ciri yang dibawa suatu masyarakat sejak lahir. Mereka hidup dalam suatu komunitas dan mengembangkan berbagai kesadaran kelompok dan solidaritas diantara mereka. Oleh karena itu konflik yang terjadi karena perbedaan warna kulit dapat meluas karena adanya solidaritas diantara mereka yang memiliki warna kulit sama. Politik perbedaan warnas kulit (*apartheid*) yang terjadi di afrika selatan merupakan konflik yang di dasarkan atas perbedaan warna kulit. Orang kulit hitam dan orang kulit putih memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dan pada dasarnya merendahkan harkat dan martabat orang kulit hitam.

Konflik antar ras biasanya sukar dipisahkan dari konflik antar suku, karena biasanya akan berimbas pada suku dengan kulit yang sama diantara mereka. Konflik antar negara Konflik antar negara adalah konflik yang terjadi antara dua negara atau lebih. Mereka memiliki perbedaan tujuan negara dan berupaya memaksakan kehendak negaranya kepada negara lain. Perang dingin dahulu antara blok timur (negara uni soviet) dan sekutunya dan negara barat amerika dan sekutunya merupakan konflik antar negara sebelum pecahnya negaram uni soviet. Perang dingin antar pakistan dan india dengan masalah khasmir antara korea utara dan korea selatan merupakan wujud dari konflik antar negara. Sedangkan konflik yang baru-baru ini terjadi adalah konflik antara palestina dengan israel.¹¹

¹¹ Simamora D, *Konflik Etnis*, Jakarta, 2009, Hal. 10-13

Faktor-Faktor Penyebab Konflik :

1. Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan.

Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur.

2. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda.

Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.

3. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok.

Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang

berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan. Para tokoh masyarakat menanggapi hutan sebagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka sehingga harus dijaga dan tidak boleh ditebang. Para petani menbang pohon-pohon karena dianggap sebagai penghalang bagi mereka untuk membuat kebun atau ladang.

Bagi para pengusaha kayu, pohon-pohon ditebang dan kemudian kayunya diekspor guna mendapatkan uang dan membuka pekerjaan. Sedangkan bagi pecinta lingkungan, hutan adalah bagian dari lingkungan sehingga harus dilestarikan. Di sini jelas terlihat ada perbedaan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya sehingga akan mendatangkan konflik sosial di masyarakat. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau antara kelompok dengan individu, misalnya konflik antara kelompok buruh dengan pengusaha yang terjadi karena perbedaan kepentingan di antara keduanya. Para buruh menginginkan upah yang memadai, sedangkan pengusaha menginginkan pendapatan yang besar untuk dinikmati sendiri dan memperbesar bidang serta volume usaha mereka.

4. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotongroyongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini, jika terjadi secara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada.¹²

¹² Lihat, <http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>, Di akses pada 11 desember 2012

2. Rekonsiliasi konflik

Rekonsiliasi konflik adalah suatu usaha untuk menyelesaikan konflik pada masa lalu sekaligus memperbaharui hubungan kearah perdamaian dan hubungan yang harmonis pada masa yang akan datang. Dalam tingkat komunitas dan nasional, Rekonsiliasi bisa dianggap sebagai suatu gerakan yang lebih kooperatif.¹³ Pada bagian berikutnya, konsep rekonsiliasi akan di paparkan lebih rinci menurut 5 aspek.

pertama Rekonsiliasi berdasarkan model pendekatan teoritik, merujuk pada salah satu model *Rational choice* atau *Game theory*, *Human Need Theory*, dan *forgiveness model*. *Kedua*, lingkup Rekonsiliasi merujuk pada pelbagai aspek hubungan (identitas, sikap, keyakinan dan perilaku). *Ketiga*, merujuk pada pelbagai aspek kebutuhan sosial dari pihak yang terlibat konflik (keadilan, kebenaran, penyembuhan dan rasa aman). Dan *keempat*, tingkatan rekonsiliasi, yang merujuk pada tingkatan intervensi rekonsiliasi, apakah pada tingkat interpersonal, komunitas dan nasional. *Terakhir*, rekonsiliasi dari pendekatan dari bawah (*Bottom-up approach*) ataukah dari atas (*top down approach*).

Rekonsiliasi pada intinya memperbaiki hubungan antara kelompok-kelompok yang terpecah karena konflik. Dalam tingkat komunitas dan nasional, rekonsiliasi bisa dianggap sebagai suatu gerakan untuk mencapai hubungan yang lebih kooperatif. Empat hal utama selayaknya menjadi inti tahapan dari rekonsiliasi. *Pertama*, mengembalikan hakikat kemanusiaan kelompok, bahkan

¹³ Melor & Bretherton, *Reconciliation*, 2003, Hal. 39

perpetrator sekalipun. Dengan kata lain, harus ada kesediaan untuk menata kembali identitas dan pendefinisian ulang hubungan antar kelompok. Dalam hal ini hak asasi dan kemanusiaan harus mendapat prioritas utama. *Kedua*, rekonsiliasi harus dipahami sebagai penataan ulang tatanan moral baru, yang bertitik tolak dari adanya konsensus mengenai nilai-nilai yang menyokong kerjasama. *Ketiga*, pentingnya perubahan sikap (*attitudinal aspect*) dan keyakinan (*belief*). Perubahan sikap dan belief adalah penting supaya seorang bisa mengatasi rasa ketakutan, rasa marah, dan dendam yang membuat konflik berkepanjangan. Keempat, pola interaksi dengan kelompok musuh harus direorientasi ulang ke arah hubungan saling tergantung yang menguntungkan. Kelompok harus berani mengambil resiko untuk memulai kontak baru supaya mulai timbul rasa percaya satu sama lain.

Dimensi rekonsiliasi yang paling tampak jelas adalah pada aspek perilaku, yaitu bagaimana pola interaksi antar kelompok selama, saat dan setelah proses rekonsiliasi. Pola interaksi yang dikehendaki adalah yang tidak lagi menunjukkan pola berkonflik (seperti eskalasi kekerasan dan curiga) namun lebih ke arah interaksi yang kooperatif. Harus ada peningkatan kualitas yang lebih baik. Mulai adanya pertukaran barang dan jasa antar kelompok misalnya, bisa menjadi indikator mulai tumbuhnya pola interaksi yang positif.¹⁴

¹⁴ Lihat, [scribd.com/doc/58858189/4/Rekonsiliasi-dan-Resolusi-Konflik,2010](https://www.scribd.com/doc/58858189/4/Rekonsiliasi-dan-Resolusi-Konflik,2010), Diakses pada 15 september 2012

Pola tingkah laku dan sikap saling terkait untuk satu kelompok dengan kelompok lainnya. Jarangnya interaksi misalnya, akan memperkuat sikap berprasangka dan timbulnya stereotip. Rasa saling tidak percaya sangat bergantung pada apakah pola interaksi masih terisolasi satu sama lain, dan tidak adanya komunikasi yang terbuka. Tingkah laku negatif yang ditampilkan oleh salah satu pihak akan memperkuat sikap negatif kelompok lainnya, dan sikap negatif ini akan memicu pola interaksi yang negatif. Sebaliknya pola interaksi yang positif akan meningkatkan rasa percaya kelompok untuk interaksi dan berani mengambil resiko yang lebih dari hubungan antar kelompok. Pola hubungan timbal balik yang positif pada akhirnya adalah modal utama untuk membangun rasa saling percaya (*trust building*) dikemudian hari. Dimensi-dimensi rekonsiliasi konflik adalah menyangkut ruang lingkup yang perlu diubah (identitas, nilai-nilai, sikap dan perilaku). Dua dimensi lainnya yang juga perlu diperhatikan dan dibahas lebih detail adalah komponen substantif dari rekonsiliasi (keadilan, kebenaran, penyembuhan dan rasa aman), dan pada tingkatan mana intervensi diperlukan (individual, komunitas, atau nasional).

Secara singkat, dapat dikatakan bahwa dimensi ruang lingkup memperlihatkan tingkat kedalaman perubahan dimana rekonsiliasi dapat dilakukan. Apakah hanya perubahan sikap, nilai atau perilaku atau sudah sampai pada perubahan identitas. Rekonsiliasi yang superfisial misalnya hanya menyentuh perubahan sikap dan perilaku, sementara transformasi kesadaran dan identitas antara kelompok-kelompok yang belum tercapai. Dimensi kedua dalam rekonsiliasi adalah komponen atau unsur-unsur substantif yang perlu diperhatikan

dalam proses rekonsiliasi. Unsur substantif ini berkaitan dengan model kebutuhan manusia (*human needs theory*). Artinya unsur-unsur kebutuhan berikut harus dijadikan agenda dalam proses rekonsiliasi. Unsur-unsur itu menyangkut kebenaran (*truth*), keadilan (*justice*), penyembuhan/pemulihan (*healing*) dan rasa aman (*security*).

Dimensi berikutnya menyangkut pada tingkat sosial tempat rekonsiliasi akan dilakukan, apakah pada tingkat individual, komunitas, atau nasional. Isu penting seputar dimensi ini adalah pada perdebatan diseputar pertanyaan pada tingkat mana itu rekonsiliasi harus dilakukan. Apakah rekonsiliasi pada suatu tingkatan tertentu mempengaruhi atau menjadi presenden untuk tingkat tingkat lainnya. Persoalan tingkat ini juga jadi sangat relevan jika di kaitkan dengan strategi dan ideologi rekonsiliasi, apakah dimulai dari bawah (*bottom up strategy*) atau dari atas kebawah (*top down strategy*).¹⁵

3. Konsep Etnis

Etnis adalah sekumpulan manusia yang memiliki kesamaan ras, adat, agama, bahasa, keturunan dan memiliki sejarah yang sama sehingga mereka memiliki keterikatan sosial sehingga mampu menciptakan sebuah sistem budaya dan mereka terikat didalamnya. Etnisitas adalah sebuah faktor fundamental dalam kehidupan manusia.

¹⁵ ibid

Ini adalah sebuah gejala yang terkandung dalam pengalaman manusia meskipun definisi ini seringkali mudah diubah-ubah. Yang lain, seperti antropolog Fredrik Barth dan Eric Wolf, menganggap etnisitas sebagai hasil interaksi, dan bukan sifat-sifat hakiki sebuah kelompok. Proses-proses yang melahirkan identifikasi seperti itu disebut etnogenesis.

Secara keseluruhan para anggota dari sebuah kelompok suku bangsa mengklaim kesinambungan budaya melintasi waktu, meskipun para sejarawan dan antropolog telah mendokumentasikan bahwa banyak dari nilai-nilai, praktik-praktik, dan norma-norma yang dianggap menunjukkan kesinambungan dengan masa lalu itu pada dasarnya adalah temuan yang relatif baru. Anggota suatu suku bangsa pada umumnya ditentukan menurut garis keturunan ayah (*patrilineal*) seperti suku bangsa Batak, menurut garis keturunan ibu (*matrilineal*) seperti suku Minang, atau menurut keduanya seperti suku Jawa.¹⁶

Dalam Ensiklopedi Indonesia disebutkan istilah etnik berarti kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Anggota-anggota suatu kelompok etnik memiliki kesamaan dalam hal sejarah (keturunan), bahasa (baik yang digunakan ataupun tidak), sistem nilai, serta adat-istiadat dan tradisi.

¹⁶ Fredrik Barth ed, *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Cultural Difference*; Eric Wolf 1982, *Europe and the People Without History*, 1969, hlm. 381

Istilah etnik menunjuk pada suatu kelompok tertentu yang karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, ataupun kombinasi dari kategori tersebut terikat pada sistem nilai budayanya. Kelompok etnik adalah kelompok orang-orang sebagai suatu populasi yang Dalam populasi kelompok mereka mampu melestarikan kelangsungan kelompok dengan berkembang biak. Mempunyai nilai-nilai budaya yang sama, dan sadar akan rasa kebersamaannya dalam suatu bentuk budaya. Membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri. Menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain.

Definisi etnik diatas menjelaskan pembatasan-pembatasan kelompok etnik yang didasarkan pada populasi tersendiri, terpisah dari kelompok lain, dan menempati lingkungan geografis tersendiri yang berbeda dengan kelompok lain. Seperti misalnya, etnik Minang menempati wilayah geografis pulau Sumatera bagian barat yang menjadi wilayah provinsi Sumatera Barat saat ini dan beberapa daerah pengaruh di provinsi sekitar. Lalu etnik Sunda menempati wilayah pulau jawa bagian barat. Dan etnik Madura menempati pulau madura sebagai wilayah geografis asal.¹⁷

¹⁷ Lihat, *Artikel Etnik dan etnisitas dari smartpsikologi.blogspot.com oleh Achmanto Mendatu*, Diakses pada 11 desember 2012

Sebuah kelompok etnik pertama kali diidentifikasi melalui hubungan darah. Apakah seseorang tergabung dalam suatu kelompok etnik tertentu atau tidak tergantung apakah orang itu memiliki hubungan darah dengan kelompok etnik itu atau tidak. Meskipun seseorang mengadopsi semua nilai-nilai dan tradisi suatu etnik tertentu tetapi jika ia tidak memiliki hubungan darah dengan anggota kelompok etnik itu, maka ia tidak bisa digolongkan anggota kelompok etnik tersebut.

Seorang batak akan tetap menjadi anggota etnik Batak meskipun dalam kesehariannya sangat 'jawa'. Orang Jawa memiliki perbendaharaan kata untuk hal ini, yakni 'durung jawa' (belum menjadi orang jawa yang semestinya) untuk orang-orang yang tidak menerapkan nilai-nilai jawa dalam keseharian mereka. Dan menganggap orang dari etnik lain yang menerapkan nilai-nilai jawa sebagai 'njawani' (berlaku seperti orang jawa). Meskipun demikian orang itu tetap tidak dianggap sebagai orang Jawa.

Agama kadangkala menjadi ciri identitas yang penting bagi suatu etnis, tapi kadangkala tidak berarti apa-apa, hanya sebagai kepercayaan yang dianut anggota etnik. Di Jawa, agama yang dianut tidak menjadi penanda identitas etnik jawa (kejawaan) seseorang. Selain Islam, orang Jawa yang menganut kristen, Hindu, Budha, ataupun Kejawen juga cukup besar. Demikian juga pada etnis Betawi ataupun Sunda. Namun berbeda dengan etnik Minang. Agama dalam masyarakat Minangkabau justru dikukuhkan sebagai identitas kultur mereka sejak animisme ditinggalkan. Islam menjadi tolak ukur ke'minang'an seseorang secara legalitas adat. Karena itu, orang Minangkabau yang tidak lagi Islam dipandang

sebagai orang yang tidak mempunyai hak dan kewajiban lagi terhadap adat Minangkabau, sebagaimana ditafsirkan dari 'adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah', kendatipun secara genealogis ia tetap beretnis Minang, yang tentu saja tidak bisa menjadi etnis lain.

Pada saat anggota kelompok etnik melakukan migrasi, sering terjadi keadaan dimana mereka tercerabut dari akar budaya etniknya karena mengadopsi nilai-nilai baru. Demikian juga dengan bahasa, banyak anak-anak dari anggota kelompok etnik tertentu yang merantau tidak bisa lagi berbahasa etniknya. Akan tetapi mereka tetap menganggap diri sebagai anggota etnik yang sama dengan orangtuanya dan juga tetap diakui oleh kelompok etniknya.

Jadi, keanggotaan seseorang pada suatu etnik terjadi begitu saja apa adanya, dan tidak bisa dirubah. Tidak bisa seorang etnis Sunda meminta dirubah menjadi etnis Bugis, atau sebaliknya. Meskipun orang bisa saja memilih untuk mengadopsi nilai-nilai, entah dari etniknya sendiri, dari etnik lain, ataupun dari gabungan keduanya. Antara satu etnik dengan etnik lainnya kadang-kadang juga terdapat kemiripan bahasa. Kesamaan bahasa itu dimungkinkan karena etnik-etnik tersebut memiliki kesamaan sejarah tradisi kuno yang satu, yang mewariskan tradisi yang mirip dan juga bahasa yang mirip pula. Seperti misalnya bahasa Jawa memiliki banyak kemiripan dengan bahasa Bali, lalu bahasa Minang mirip dengan bahasa Banjar, dan lainnya.

Keanggotaan etnik yang menekankan hubungan 'darah' menurut keterangan diatas merupakan bagian dari perspektif teori primordial yang menyatakan bahwa etnisitas merupakan suatu keniscayaan. Keniscayaan tersebut meliputi keterpautan manusia pada kedekatan wilayah teritorial dan hubungan kerabat, bahkan juga keniscayaan bahwa individu selalu dilahirkan dalam sebuah masyarakat yang sudah terbentuk dengan sistem keagamaan, bahasa dan adat istiadatnya. Menurut perspektif ini, seseorang yang memiliki darah sebagai etnis Minang misalnya, maka ia tidak bisa mengelakkannya. Ia harus menerima fakta bahwa dirinya adalah seorang 'Minang'. Etnik dalam perspektif primordial merupakan sesuatu yang memang sudah ada dan tinggal di lanjutkan.

Dalam antropologi ada tiga perspektif teori utama yang digunakan untuk membahas mengenai etnisitas, selain teori primordial, dua lainnya adalah teori situasional, dan teori relasional. Teori situasional berseberangan dengan teori primordial. Teori situasional memandang bahwa kelompok etnis adalah entitas yang dibangun atas dasar kesamaan para warganya, bagi mereka yang lebih penting bukan wujud kesamaan itu sendiri melainkan perihal penentuan dan pemeliharaan batas-batas etnis yang diyakini bersifat selektif dan merupakan jawaban atas kondisi sosial historis tertentu.

Teori ini menekankan bahwa kesamaan kultural merupakan faktor yang lebih besar dibanding kesamaan darah dalam penggolongan orang-orang kedalam kelompok etnik. Menurut perspektif teori situasional, etnik merupakan hasil dari adanya pengaruh yang berasal dari luar kelompok. Salah satu faktor luar yang sangat berpengaruh terhadap etnisitas adalah kolonialisme, yang demi

kepentingan administratif pemerintah kolonial telah mengkotak-kotakkan warga jajahan ke dalam kelompok-kelompok etnik dan ras. Untuk seterusnya sisa warisan kolonial itu terus dipakai sampai sekarang. Contoh yang paling jelas adalah pembentukan identitas etnik Dayak. Istilah Dayak diberikan oleh kolonial Belanda untuk menyebut seluruh penduduk asli pulau Kalimantan. Padahal sesungguhnya etnik Dayak terdiri dari banyak subetnik (yang sebenarnya sebagai etnik sendiri yang sangat berbeda satu sama lain, seperti Benuaq dan Ngaju). Istilah Dayak sendiri tidak dipergunakan sebagai identitas mereka. Mereka menyebut diri sebagai orang Benuaq jika itu etnis Benuaq.

Teori relasional mendasarkan pada pandangan bahwa kelompok etnik merupakan penggabungan dua entitas atau lebih yang memiliki persamaan maupun perbedaan yang telah dibandingkan dalam menentukan pembentukan etnik dan pemeliharaan batas-batasnya. Kesamaan-kesamaan yang ada pada dua atau lebih entitas yang disatukan akan menjadi identitas etnik. Menurut perspektif relasional ini, etnik ada karena adanya hubungan antara entitas yang berbeda-beda. etnik Sasak (NTB) tidak akan menjadi etnik Sasak bila tidak mengalami hubungan dengan entitas di luar kelompok itu. Etnik tergantung pada pengakuan entitas lain di luar kelompok.

Saat ini sepertinya tidak relevan lagi membicarakan mengenai etnik mengingat batas-batas etnik telah semakin kabur. Batas-batas budaya antar etnik telah semakin tidak jelas. Saat ini segala manusia dari berbagai etnik telah semakin melebur dalam kehidupan sosial yang satu. Apalagi globalisasi yang begitu deras dan nyaris tak tertahankan bertendensi memunculkan keseragaman budaya, baik dalam pola pikir, sikap, tingkah laku, seni, dan sebagainya. Saat ini, menemukan kekhasan perilaku dari etnik tertentu bukan hal yang mudah. Semua etnis pada dasarnya memiliki perilaku yang sama. Misalnya hampir tak dapat dibedakan lagi seorang Minang dengan seorang Jawa, seorang Bugis dengan seorang Batak dalam hal tata pergaulan.¹⁸

Etnik sebagai kategori untuk membedakan ‘perilaku’ orang-orang merupakan sesuatu yang telah usang. ‘Model untuk’ yang digunakan dengan mengelompokkan perilaku dan budaya tertentu diasosiasikan dengan etnik tertentu sudah tidak dapat lagi dipergunakan. Sekarang ini, etnik sebagai identitas tidak berarti harus menunjukkan adanya perbedaan budaya. Mengaku berbeda etnik bukan lantas harus menunjukkan perbedaan dalam perilaku. Namun meski demikian, masyarakat umumnya tetap menganut adanya model-model perilaku dan sifat tertentu yang khas etnik tertentu, dan model tersebut digunakan untuk menjelaskan keberadaan etnik bersangkutan.

¹⁸ Lihat, Artikel *Pengertian dan Makna Studi Etnografi* dari scribd.com oleh Syiham Al Ahmadi, Diakses pada 12 Desember 2012

Persoalannya kemudian beranjak kepada masalah identitas. Etnik tetap ada karena berkait dengan kebutuhan akan identitas-identitas. Meskipun terdapat kesamaan-kesamaan yang besar dengan etnik lain, hal itu tidak menghalangi untuk tetap merasa berbeda. Identitas etnik yang diperkuat, dimana identitas etnik semakin kerap ditonjolkan dalam kehidupan sosial seperti yang terjadi belakangan ini, kontradiktif dengan ramalan para pemuja globalisasi. Justru, perkuatan identitas etnik lahir sebagai perlawanan atas globalisasi.

Etnik dijadikan alat politik untuk mendapatkan posisi tawar yang lebih tinggi dalam meraih sumber daya tertentu. Beberapa manifestasi politik identitas etnik diantaranya, munculnya negara-negara etnik (seperti yang terjadi di bekas negara Soviet), tuntutan kemerdekaan atas suatu wilayah karena diklaim milik etnik tertentu (seperti di Aceh), tuntutan akan pengembalian tanah adat yang dipergunakan untuk perkebunan dan lainnya (terjadi hampir diseluruh Indonesia, terutama di luar Jawa), tuntutan pengembalian kekuasaan adat (terlihat dalam kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, tahun 2003 lalu, dan berkembangnya isu putera daerah dalam era otonomi daerah (terjadi hampir diseluruh daerah).

Berbicara mengenai etnisitas tetap tidak kehilangan momentum. Hanya saja, pemahaman mengenai etnisitas perlu ditambahkan. Tidak saja etnik sebagai kategori orang-orang karena budaya dan darah, tetapi lebih penting lagi telah menjadi kategori identitas politis, dimana identitas etnis tetap dipertahankan karena memang bermanfaat. Meminjam istilah Edward Said, guru orientalisme, identitas etnis pun bisa dipilah sebagai identitas murni dan identitas politis.

Identitas etnik menjadi identitas politis manakala identitas itu dipergunakan demi tujuan tertentu untuk memperoleh kemanfaatan tertentu.¹⁹

4. Konsep Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah menurut Ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Mengingat Negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan memiliki daerah yang sangat luas, Pemerintah Pusat mengadakan alat-alat perlengkapan setempat yang disebarkan ke seluruh wilayah Negara yang terdapat di daerah, ini disebabkan Pemerintah Pusat tidak dapat menangani secara langsung urusan-urusan yang ada di daerah. Namun bukan berarti pemerintah pusat melepaskan tanggung-jawabnya.

Meskipun Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tetapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak dapat mencampuri bidang Eksekutif.

¹⁹ Michael E. Brown, "*Causes and Implications of Ethnic Conflict*", dalam *The Ethnicity Reader. Nationalism, Multiculturalism, and Migration*, Guibernau dan John Rex (eds), Great Britain, Polity Press, 1997, hal. 80-100

Eksekutif merupakan wewenang dan tanggung jawab dari Kepala Daerah. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ada pembagian tugas yang jelas. Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya memimpin dalam bidang eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bergerak dalam Bidang Legislatif. Desentralisasi menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didalam Pasal 1 ayat 7 adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Republik Indonesia. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang sebagai badan eksekutif daerah. Artinya, lembaga eksekutif terdiri dari kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain.²⁰

Dalam ilmu sosial, pemerintah merujuk pada legislator, administrator dan arbiter dalam birokrasi administrasi yang kontrol negara di waktu tertentu dan sistem pemerintahan dengan yang mereka terorganisir. Pemerintah sebagai sarana yang diberlakukan kebijakan negara, serta mekanisme untuk menentukan kebijakan negara.

A. Tugas Pemerintah Daerah

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan sistem sosial, akan senantiasa

²⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian, dan makanan.²¹

Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat. Kebutuhan sekunder tersebut adalah kebutuhan untuk bekerjasama, menyelesaikan konflik, dan interaksi antar sesama warga masyarakat.

Dengan timbulnya kebutuhan dasar dan sekunder tersebut maka terbentuk pula institusi sosial yang dapat memberi pedoman melakukan kontrol dan mempersatukan (integrasi) anggota masyarakat. Untuk membentuk suatu institusi-institusi tersebut, masyarakat membuat kesepakatan atau perjanjian diantara mereka. Adanya kontrak sosial tersebut selanjutnya melahirkan kekuasaan dan institusi pemerintah.

Tugas-tugas pokok Pemerintah Daerah mencakup :²²

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah melalui cara-cara kekerasan.

²¹ Lihat, <http://www.wisnuvegetarianorganic.wordpress.com/>, Diakses pada 16 oktober 2012

²² Ibid

2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumberdaya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan.²³

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tenteram dan damai. Pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri. Pemerintah dituntut mampu memberikan pelayanan kepada

²³ Agus salim Andi Gadjong, *Pemerintah daerah kajian politik dan hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, Hal. 20

masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

B. Fungsi Pemerintah Daerah

Secara umum fungsi pemerintah mencakup tiga fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu :

- Fungsi Pengaturan

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.

- Fungsi Pelayanan

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (*Public service*) dan pelayanan sipil (*Civil service*) yang menghargai kesetaraan.

- Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.²⁴

²⁴ H. Nurul Aini dalam Haryanto dkk, *Tugas dan Fungsi Pemerintah*, Jakarta, 1997, Hal. 36-37

E. Definisi Konsepsional

Konsep atau pengertian merupakan suatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Apabila masalah dan teorinya sudah jelas, biasanya dapat diketahui fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian.

1. Konflik adalah gesekan yang terjadi antara dua kelompok atau lebih yang disebabkan adanya perbedaan nilai, status, kekuasaan, kelangkaan sumber daya, serta distribusi yang tidak merata, yang dapat menimbulkan deprivasi relative di masyarakat.
2. Rekonsiliasi konflik adalah suatu usaha untuk menyelesaikan konflik pada masa lalu sekaligus memperbaharui hubungan kearah perdamaian dan hubungan yang harmonis pada masa yang akan datang.
3. Etnis adalah sekumpulan manusia yang memiliki kesamaan ras, adat, agama, bahasa, keturunan dan memiliki sejarah yang sama sehingga mereka memiliki keterikatan sosial sehingga mampu menciptakan sebuah sistem budaya dan mereka terikat didalamnya.
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

F. Definisi Operasional

Dalam hal ini penulis sengaja membatasi jangkauan permasalahan hanya pada posisi Peran Pemerintah kota Tarakan dalam Rekonsiliasi konflik etnis hal ini terkait dengan konflik etnis yang terjadi di kota Tarakan, dimana peran pemerintah sebagai kontrol di daerah dan negara untuk menciptakan keamanan, melindungi, dan memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya konflik atau gesekan-gesekan sosial di antara warga masyarakat dan menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai. Adapun Peran Pemerintah kota Tarakan dalam Rekonsiliasi konflik :

A. Peran Pemerintah kota Tarakan :

1. Dalam penyelesaian konflik di kota Tarakan pemerintah kota melakukan sinergi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait.
2. Pemerintah kota Tarakan beserta pihak terkait mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik guna membuat beberapa poin kesepakatan damai.

B. faktor pendukung dan penghambat penyelesaian konflik di kota Tarakan :

- Faktor pendukung
 1. Luas wilayah atau teritorial kota Tarakan yang kecil dan tidak luas sehingga pihak polres dan kodim 0907 kota Tarakan dapat memblokade pintu masuk masyarakat luar kota Tarakan yang ingin membantu salah satu pihak yang berkonflik.

2. Adanya sinergisitas atau kerjasama yang kuat antara pemerintah kota Tarakan, Polres, kodim 0907 kota Tarakan dan instansi terkait dalam penyelesaian konflik di kota Tarakan.
 3. Kesadaran masyarakat bahwa didalam kehidupan sosial mereka sudah terjalin perkawinan antara warga etnis Dayak Tidung dengan Bugis-Letta.
- Faktor penghambat
 1. Egoisme yang tinggi dan runtuhnya rasa percaya antara etnis Dayak Tidung dengan Bugis-Letta.
 2. Adanya provokator yang kuat dari kedua belah pihak yang berkonflik agar saling menghasut untuk tidak melakukan kesepakatan damai dengan dalih “gengsi” untuk siapa yang memulai meminta maaf dan mengakhiri konflik.
 3. Minimnya SDM kedua belah pihak untuk memahami damai.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.

- a. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang diawali dengan mengumpulkan informasi untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang rasional. Masalah yang diungkap dapat disiapkan sebelum

pengumpulan data atau informasi berlangsung, akan tetapi data bersifat berkembang dan dapat berubah selama kegiatan penelitian dilakukan.

- b. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang di maksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena-fenomena sosial tertentu.

Ciri-ciri metode deskriptif adalah :

- Memfokuskan pada pemecahan masalah-masalah yang ada saat ini dan masalah-masalah aktual.
- Data-data yang didapatkan mula-mula disusun kemudian dijelaskan dan dianalisa.

2. Jenis Data

Ada dua jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari unit analisa yaitu Pemerintah kota Tarakan yang meliputi Walikota dan Wakil Walikota, Polres kota Tarakan, Kodim kota Tarakan, dan BAPPEDA kota Tarakan yang tentunya mampu untuk menjelaskan dan menggambarkan perihal konflik etnis yang terjadi di kota Tarakan.
- b. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung, seperti video, foto-foto dan dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian ataupun yang terkait dengan penelitian di dalam unit analisa yang di jadikan

sebagai objek penelitian seperti laporan kejadian konflik, hasil penandatanganan kesepakatan damai I,II dan III, dan lain-lain.

3. Unit Analisa Data

Unit analisa data dalam penelitian ini adalah pemerintah kota Tarakan

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Interview

Penulis mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan mengenai konsep penelitian (atau yang terkait dengannya) terhadap individu manusia yang menjadi unit analisa penelitian ataupun terhadap individu manusia yang dianggap memiliki data mengenai unit analisa penelitian. Seperti kepada walikota/wakil walikota kota Tarakan yaitu bapak H.Udin Hianggio dan bapak Suharjo, Kasat Binmas Polres Tarakan bapak P.Simanjuntak, Kodim 0907 bapak Kapten Gunanto, kepala Kesbangpol Linmas bapak Atmadi, anggota DPRD kota Tarakan Ir. Yancong.

Pertanyaan :

1. Apa faktor utama penyebab terjadinya konflik etnis di kota Tarakan ?
2. Langkah apa yang dilakukan dalam penyelesaian konflik di kota Tarakan ?

3. bagaimana langkah untuk mengembalikan rasa percaya kedua belah pihak pasca konflik ?

2. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan berbagai dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian yang di ambil dari Pemerintah kota Tarakan, Polres kota Tarakan, Kodim 0907 kota Tarakan, dan Kesbangpol Linmas. Serta website dan media massa.

5. Teknik Analisis Data

Dalam studi penelitian ini proses analisis data di susun secara sistematis sebagai berikut:²⁵

a. Pengumpulan data, merupakan proses pencarian data dari berbagai sumber sesuai dengan teknik pengumpulan data, data yang terkumpul kemudian disusun terlebih dahulu sebelum diolah lebih lanjut.

Pengumpulan data ini menggunakan metode dokumentasi yaitu :

Dengan menggunakan bahan-bahan referensi yang di peroleh melalui studi pustaka. Adapun sumber data tersebut meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan data dari internet yang sesuai dengan masalah yang dikaji.

²⁵ Mengikuti pola-pola yang dianjurkan oleh Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hal 121-208

- b. Penyajian data dan klasifikasi data; penyajian data dilakukan setelah pengumpulan data dirasa cukup, penyajian data dilakukan terhadap keabsahan data tersebut, keterkaitan dengan data lainnya, dan kesesuaian dengan tema penulisan, klasifikasi data yang dilakukan dengan cara membagi data-data ke dalam kategori teori atau bukan.
- c. Interpretasi data, berupa penafsiran-penafsiran terhadap apa yang tersirat di dalam rangkaian data yang di sajikan, kemudian mencari pola-pola hubungan dan keterkaitan dengan konsep atau fenomena satu sama lain, untuk itu dalam tahap ini peneliti menghubungkan data-data yang telah tersaji dengan bekal teori yang dipakai dalam penelitian ini.
- d. Penyimpulan data, dilakukan dengan membuat kesimpulan terhadap penafsiran data.

H. Sistematika Penulisan

Tulisan ini secara keseluruhan tersusun dalam bab per bab. Setiap babnya terbagi lagi dalam sub-sub bab, hal ini dimaksudkan agar penulis dapat membedakan jenis permasalahan yang diteliti, sementara sub-sub babnya, dimaksudkan agar dapat menguraikan isi dari tiap-tiap bab secara terperinci.

Bab pertama dalam penulisan ini memaparkan kerangka kerja secara garis besar terjadinya konflik etnis di Indonesia khususnya konflik etnis yang terjadi di kota Tarakan di utara pulau Kalimantan Timur yang menimbulkan konflik

komunal antara etnis Dayak Tidung dengan etnis Bugis-Letta. Serta berdampak kepada penduduk yang ada di wilayah tersebut.

Bab kedua akan mengupas mengenai sejarah perkembangan kota Tarakan baik itu dalam proses lahirnya atau berdirinya kota Tarakan, sejarah kerajaan yang mempunyai julukan "Bumi Paguntaka" ini serta berbagai keberagaman suku, ras, dan agama yang mendiami kota Tarakan dan sumber-sumber daya alam yang dimiliki kota yang masyarakatnya paling dominan etnis Bugis Makassar, Tionghoa, Melayu dan Dayak Tidung ini diantara etnis lainnya.

Bab ketiga akan membahas mengenai awal mula atau jejak historis terjadinya konflik etnis yang mengakibatkan banyak korban serta ratusan pengungsi, hingga proses perdamaian yang dilakukan oleh pemerintah kota Tarakan beserta pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab atas konflik tersebut.

Pada bab keempat membahas bagaimana peran pemerintah kota Tarakan dalam Rekonsiliasi konflik etnis yang terjadi di kota Tarakan serta apa faktor pendukung dan penghambat yang mempercepat proses perdamaian dan tahapan-tahapan yang dilakukan pemerintah kota Tarakan dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Sementara pada bab kelima merupakan bagian perangkuman atau penyimpulan dari apa yang menjadi permasalahan di bab-bab sebelumnya. Selain berisi rangkuman dan kesimpulan, bab ini juga akan mengemukakan saran-saran sebagai suatu tindak lanjut dari kesimpulan-kesimpulan tersebut